

DAFTAR PUSTAKA

- Azizi, N. L. L. (2016). Otonomi daerah dan pembangunan perdesaan. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–221.
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146–154.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 6(1), 14–24.
- KemenDes PD TT. (2021). *Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Status Perkembangan Desa Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021*. Direktorat Pembangunan Desa dan Perdesaan.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2019). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2020). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, & Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. In *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Kementrian Keuangan Indonesia.

- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa*. Kementrian Keuangan Indonesia.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa*. Kementrian Keuangan Indonesia.
- Khoiriah, S., & Meylina, U. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.20-29>
- Meutia, I. (2017). Pengelolaan keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 336–352.
- Pemerintah Desa Bumbung. (2020a). *Peraturan Desa Bumbung Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumbung Tahun Anggaran 2021*. Pemerintah Desa Bumbung.
- Pemerintah Desa Bumbung. (2020b). *Peraturan Desa Bumbung Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumbung Tahun Anggaran 2021*. Pemerintah Desa Bumbung.
- Pemerintah Desa Bumbung. (2022). *Peraturan Desa Bumbung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021*. Pemerintah Desa Bumbung.
- Pemerintah Kabupaten Bengkalis. (2021a). *Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021*. Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- Pemerintah Kabupaten Bengkalis. (2021b). *Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021*. Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- Putri, L. S. (2016). Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 161–175.
- Rahayu, D. (2017). Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107–116.

- Republik Indonesia. (2014a). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia. (2014b). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia. (2014c). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Kementerian Hukum dan HAM.
- Rivan, Arif & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, Vol. 9(2), 92–100.
- Sembiring, A. R. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (Add), Dan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Bhpdrd) Pada Desa-Desa Di Kabupaten Karo*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Tumulung Satu kecamatan Tareran kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6(1), 1–21.
- Wasistiono. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Fokus Media.
- Zainudin, A. (2016). Model Kelembagaan Pemerintahan Desa. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(2), 338–351. <https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.338-351>